



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deregulasi perbankan di Indonesia telah membuat perbankan Indonesia menjadi terbuka terhadap pihak asing, sehingga membuat beberapa bank asing bisa mendirikan cabangnya di Indonesia, mendirikan usaha patungan maupun melakukan akuisisi bank-bank di Indonesia. Hal tersebut membuat kepemilikan asing pada bank-bank swasta nasional di Indonesia juga meningkat (Mulyaningsih *et al*, 2015). Berdasarkan data pokok Bank Indonesia, pada tahun 2011 bank dengan kepemilikan asing termasuk di dalamnya bank swasta nasional yang dimiliki asing mencapai 46,26% dan terus mengalami peningkatan menjadi 50,04% pada tahun 2014. Kepemilikan asing yang terus meningkat dikarenakan regulasi yang mengatur mengenai kepemilikan asing pada perbankan Indonesia masih longgar. Pasar perbankan Indonesia yang masih menjanjikan membuat bank-bank asing yang unggul di korporat tertarik untuk menekuni pasar ritel perbankan dengan melakukan akuisisi bank-bank swasta nasional (Infobank,2013:26).

Peningkatan kepemilikan asing pada bank di Indonesia diikuti oleh penurunan kepemilikan swasta domestik Indonesia. Pada tahun 2011 kepemilikan swasta domestik pada bank swasta nasional yaitu sebesar 46,29% menurun menjadi 42,41% pada tahun 2014. Penurunan kepemilikan swasta domestik Indonesia selain karena terjadinya akuisisi, juga di sebabkan dilakukannya merger antar bank, maupun bank melakukan *go public*.

Penurunan kepemilikan juga terjadi pada bank pemerintah. Pada tahun 2011 kepemilikan pemerintah sebesar 92,60% dan menurun menjadi 90,59% di tahun 2014. Penurunan kepemilikan pemerintah disebabkan oleh beberapa bank pemerintah yang melakukan *go public* sehingga meningkatkan kepemilikan publik.

Bank Indonesia menghimbau bank-bank untuk menyalurkan 20% dari kreditnya untuk UMKM hingga tahun 2018 (Sumber: Detik Finance). Himbauan Bank Indonesia membuat bank-bank swasta maupun pemerintah mulai melirik sektor UMKM. Berdasarkan Statistik Bank Indonesia tahun 2011 hingga 2014, penyaluran kredit UMKM bank konvensional pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 458,154 triliun dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 15,674 triliun dan penyaluran kredit terus meningkat menjadi Rp 671,721 triliun dengan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp 25,159 triliun di tahun 2014.

Bank pemerintah pada tahun 2011 menyumbang penyaluran kredit UMKM sebesar 55% dari total penyaluran kredit bank konvensional, dan terus meningkat menjadi 58% pada tahun 2014. Penyaluran kredit yang tinggi dari bank pemerintah juga menyumbang jumlah kredit bermasalah yang cukup tinggi. Pada tahun 2011 jumlah kredit bermasalah pada bank pemerintah yaitu sebesar 67,71% dari total kredit bermasalah bank konvensional dan meningkat menjadi 68,18% pada tahun 2014.

Penyaluran kredit UMKM oleh bank swasta menyumbang 45% dari total penyaluran kredit di tahun 2011 dan mengalami penurunan menjadi 42% di tahun 2014. Penurunan jumlah penyaluran kredit juga diikuti dengan penurunan

persentase jumlah kredit bermasalah pada bank swasta. Pada tahun 2011 jumlah kredit bermasalah pada bank swasta sebesar 32,29% dan menurun di tahun 2014 sebesar 31,82%.

Jumlah kredit bermasalah bank swasta yang rendah pada sektor UMKM dikarenakan bank-bank swasta dalam menyalurkan kredit UMKM lebih sedikit dibanding dengan bank pemerintah. Bank swasta asing lebih memilih membidik sektor ekspor dan impor (sumber : Bisnis Keuangan Kompas), sehingga porsi penyaluran terhadap kredit UMKM mengalami penurunan.

Tingginya kredit bermasalah pada bank pemerintah disebabkan karena bank pemerintah berfungsi sebagai agen yang membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Penyaluran kredit untuk UMKM bertujuan untuk membangkitkan UMKM agar bisa meningkatkan perkembangan UMKM sebagai sumber ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran. Bank milik pemerintah juga memberikan kredit untuk proyek-proyek pemerintah yang memiliki risiko kredit tinggi dan memerlukan jumlah pendanaan besar. Bank swasta pada umumnya enggan mengambil proyek – proyek tersebut.

Kepemilikan atas suatu bank menentukan arah kebijakan dari bank tersebut. Pemilik bank mempunyai andil dalam menentukan dewan direksi dan juga komisaris yang nantinya menentukan kebijakan bank kedepannya. Menurut Levine (dikutip dari Chiang Lee dan Fen Hsieh, 2014) bank dengan kepemilikan asing dapat meningkatkan operasional dari bank-bank domestik. Peningkatan yang terjadi yaitu berupa adopsi keterampilan perbankan modern dan teknologi,

pengembangan pengawasan bank dan peningkatan akses untuk memperoleh pendanaan internasional. Bank dengan kepemilikan asing juga mempunyai andil dalam pengembangan sumber daya manusia pada perbankan domestik. Berdasarkan paparan Arwin Rasyid (2015), yang menceritakan pengalamannya sebagai bankir, menunjukkan bahwa bank asing mempunyai peran dalam menghasilkan bankir-bankir profesional di Indonesia. Pengembangan sumber daya dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan kepada bankir-bankir tersebut, dan pada akhirnya berpindah dan menduduki kursi-kursi direktur maupun komisaris pada bank-bank swasta domestik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yizhe Dong *et al* (2014) mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap NPL, ditemukan bahwa struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan kepemilikan swasta berpengaruh negatif terhadap NPL. Pendapat tersebut juga didukung oleh Boudriga *et al* (2009) pada penelitiannya di 59 negara yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap NPL dan struktur kepemilikan swasta asing berpengaruh negatif terhadap NPL. Sebaliknya Taswan *et al* (2012) dalam penelitiannya di Indonesia menunjukkan bahwa struktur kepemilikan swasta domestik dan swasta asing secara berpengaruh positif terhadap risiko kredit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap risiko kredit pada bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap risiko kredit pada bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disebut maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi manajemen bank, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap risiko kredit pada bank pemerintah dan bank swasta.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan referensi tambahan mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap risiko kredit pada bank pemerintah dan bank swasta.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan usulan penelitian ini disajikan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang dari masalah pengaruh struktur kepemilikan terhadap risiko kredit, serta berisi perumusan masalah, manfaat, tujuan dan sistematika penulisan

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai landasan teori mengenai pengertian dan jenis bank, pengertian kredit, risiko kredit, faktor-faktor yang memengaruhi risiko kredit, penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis, model analisis, kerangka pemikiran.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, metode penentuan sampel, dan teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil uji asumsi klasik, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan batasan-batasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya